



INFORMASI CAPAIAN AKUNTABILITAS

PEMERINTAH KABUPATEN
MOROWALI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat hidayahnya dan Inayahnya sehingga penyusunan Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara review laporan kinerja instansi pemerintah.

Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Akhir kata, semoga informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Morowali, Maret 2025

BUPATI MOROWALI,



IKSAN ABDUL RAUF



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 atas perencanaan kinerja memiliki lima (5) misi dengan lima (5) Tujuan strategis dengan tujuh (7) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari dua belas (12) Sasaran strategis dengan dua puluh enam (26) indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama dari Tujuan Strategis tersebut atas realisasi / capaian yang di peroleh di tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Capaian Tujuan Strategis

T.S	IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	KET
T.S.1	Angka Kemiskinan	%	11,3	11,55	102%	Baik Sekali (Melebihi Target)
T.S.2	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	25,00	20,34	81,36%	Cukup Baik (Belum Mencapai Target)
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,00	74,36	100,49%	Sangat Baik (Melebihi Target)
T.S.3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	B	68,25 (B)	100%	Baik (Mencapai Target)
T.S.4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	60,00	n/a	n/a	Belum Rilis
T.S.5	Indeks Rasa Aman	Indeks	75,00	n/a	n/a	Belum Rilis
	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten	Indeks	173,50	171,17	99%	Cukup Baik (Belum Mencapai Target)

T.S = Tujuan Strategis, S.S = Sasaran Strategis

Dari tabel diatas terlihat bahwa tujuh (7) indikator kinerja utama Tujuan Strategis dua diantaranya dengan capaian melebihi target dengan Kategori **Sangat Baik**, satu (1) indikator dengan capaian mencapai target dengan kategori **Baik** dan dua (2) indikator dengan capaian belum



memenuhi target dengan Kategori **Cukup Baik** serta dua (2) indikator belum rilis.

Tabel Capaian Sasaran Strategis

T.S 1	S.S	IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	KET
T.S 1	S.S 1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,52	1,79	106%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S 2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,32	0,43	118,86%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S 3	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,28	0,281	99,64%	Cukup Baik (Belum Mencapai Target)
T.S.2	S.S.1	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	498,00	570,12	114%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S.2	Inflasi	%	2,00	1,23	139%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,50	2,84	114%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S.4	Persentase Kenaikan PAD	%	6	26,8%	447%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S.5	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	90	81,583	90,65%	Cukup Baik (Belum Mencapai Target)
	S.S.1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,43	0,40	93,02%	Cukup Baik (Belum Mencapai Target)
	S.S.2	Stunting (SSGI)	%	17	4,2	165%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S.3	Indeks Pendidikan	Indeks	57,00	83,72	147%	Baik Sekali (Melebihi Target)
T.S.3	S.S.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	%	80,00	n/a	n/a	



	S.S.2	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	100%	Baik (Mencapai Target)
	S.S.3	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,40	70,80	91%	Cukup Baik (Belum Mencapai Target)
	S.S.4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40,00	45,89	115%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S.5	Nilai SPBE	Nilai	2,88	3,25	113%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S.6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	68,96	n/a		
	S.S.7	Indeks Profesionalitas ASN	%	73	66,46	91%	Cukup Baik (Belum Mencapai Target)
T.S.4	S.S.1	Persentase Jalan dalam kondisi baik	%	24,50	37,49	153,02%	Baik Sekali (Melebihi Target)
	S.S.2	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	%	55,00	n/a		
	S.S.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,00	78,17	96,51%	Cukup Baik (Belum Mencapai Target)
T.S.5	T.S. 1	Angka kriminalitas	%	17,50	n/a		
	T.S. 2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,50	n/a		
	T.S. 3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Indeks	Level 2	0,34		
	T.S. 4	Indeks Desa Membangun Desa	Indeks	0,6178	0,7288	118%	Baik Sekali (Melebihi Target)



Dari tabel di atas dua puluh enam (26) capaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis yaitu :

- Ada dua belas (12) indikator kinerja utama dengan capaian melebihi target dengan kategori **Baik Sekali**;
- Satu (1) indikator kinerja utama dengan capaian sesuai target dengan kategori **Baik**;
- Enam (6) indikator kinerja utama dengan capaian belum mencapai target dengan kategori **cukup Baik**;
- Lima (5) indikator kinerja utama belum rilis
- Dan satu (1) indikator dengan capaian tidak dapat di ketahui karena pembandingan pada target berbeda yakni antara angka dan level.

Dari hasil capaian diatas tentunya pemerintah kabupaten morowali telah memberikan kinerja dengan baik, sehingga dengan hasil capaian kinerja tahun 2024 di harapkan dapat meningkatkan kinerja serta dapat menjadi evaluasi dan masukkan sebagai penyempurnaan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja dalam perjanjian kinerja;

Untuk menghasilkan pembangunan daerah yang berdampak bagi masyarakat perlu memperhitungkan, memperhatikan dan mengelola dampak pembangunan secara berkelanjutan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat dan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

TUJUAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata				
Indikator Kinerja			Satuan	Target
1.1	Angka Kemiskinan		%	11,3
1.1.1 Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin				
	1.1.1.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,90
	1.1.1.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,32
	1.1.1.3	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,280

TUJUAN STRATEGIS II				
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Saing Daerah				
Indikator Kinerja		Satuan		Target
2.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi		%	25,00
2.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat				
	2.1.1.1	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	498
	2.1.1.2	Inflasi	%	2,00
2.1.2 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja				
	2.1.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,50
2.1.3 Meningkatnya Nilai Investasi dan Pendapatan Daerah				
	2.1.3.1	Persentase Kenaikan PAD	%	6
	2.1.3.2	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	90
Indikator Kinerja		Satuan		Target
2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	74
2.2.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan				
	2.2.1.1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,43
	2.2.1.2	Stunting (SSGI)	%	17
2.2.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan				
	2.2.2.1	Indeks Pendidikan	Indeks	57,00

TUJUAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah				
Indikator Kinerja		Satuan		Target
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		Predikat	B
3.1.1 Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	3.1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	%	80,00
	3.1.1.2	Nilai SAKIP	Predikat	B

	3.1.1.3	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,4 (Waspada)
	3.1.1.4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40,00
	3.1.1.5	Nilai SPBE	Nilai	2,88
	3.1.1.6	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPKD)	Nilai	WTP
3.1.2 Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN				
	3.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	%	73

TUJUAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata				
	Indikator Kinerja		Satuan	Target
4.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		Indeks	60,00
4.1.1 Meningkatnya Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik				
	4.1.1.1	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	%	24,50
4.1.2 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang				
	4.1.2.1	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	%	55,00
4.1.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan				
	4.1.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	81,00

TUJUAN STRATEGIS V				
Menciptakan tatanan kehidupan wilayah yang aman,tentram dan tertib serta jauh dari risiko bencana guna menunjang efektifits pembangunan wilayah				
	Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.1	Indeks Rasa Aman		Indeks	75,00
5.1.1 Terjaganya Kehidupan Masyarakat yang aman dan tentram damai dan Harmonis				
	5.1.1.1	Angka kriminalitas	%	17,50
	5.1.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,50
5.2	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten		Indeks	173,50
5.2.1 Meningkatnya Kapasitas penanggulangan Bencana Daerah dan Kemajuan Pembangunan Desa				
	5.2.1.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Indeks	Level 2
	5.2.1.2	Indeks Desa Membangun Desa	Indeks	0,6178

- b. Pengukuran capaian kinerja di bandingkan dengan target perjanjian kinerja;

Berikut tabel capaian kinerja di bandingkan dengan target perjanjian kinerja :

Tabel. 2.3.1

Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

TUJUAN STRATEGIS I						
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembanunan Jaminan Sosial Yang Merata						
Indikator Kinerja			Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.1	Angka Kemiskinan		%	11,3	11,55	102%
Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin						
	1.1.1.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,900	1,790	105,79%
	1.1.1.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,52	0,43	118,86%
	1.1.1.3	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,280	0,281	99,64%

TUJUAN STRATEGIS II						
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Saing Daerah						
	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
2.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi		%	25,00	20,34	81,36%
2.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat						
	2.1.1.1	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	498	570,12	114,48%
	2.1.1.2	Inflasi	%	2,00	1,230	138,5%
2.1.2 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja						
	2.1.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,50	2,84	114%
2.1.3 Meningkatnya Nilai Investasi dan Pendapatan Daerah						
	2.1.3.1	Persentase Kenaikan PAD	%	6	26,8%	447%
	2.1.3.2	Nilai Investasi	Rp (Trilliun)	90	81,583	90,65%
	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	74	74,36	100%
2.2.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan						
	2.2.1.1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,43	0,40	93,02%
	2.2.1.2	Stunting (SSGI)	%	17	4,2	165%
2.2.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan						
	2.2.2.1	Indeks Pendidikan	Indeks	57,00	83,72	147%

TUJUAN STRATEGIS III						
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah						
	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		Predikat	B	68,25 (B)	100%
3.1.1 Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	3.1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	%	80,00	n/a	n/a
	3.1.1.2	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	100%
	3.1.1.3	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,40	70,80	91%
	3.1.1.4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40,00	45,89	115%
	3.1.1.5	Nilai SPBE	Nilai	2,88	3,25	113%
	3.1.1.6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	68,96	n/a	
3.1.2 Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN						
	3.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	%	73	66,46	91%

TUJUAN STRATEGIS IV						
Meningkatnya Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata						
	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
4.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		Indeks	60,00	n/a	n/a
4.1.1 Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	4.1.1.1	Persentase Jalan dalam kondisi baik	%	24,50	37,49	153,02%
4.1.2 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang						
	4.1.2.1	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	%	55,00	n/a	n/a
4.1.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan						
	4.1.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,00	78,17	96,51%



TUJUAN STRATEGIS V						
Menciptakan tatanan kehidupan wilayah yang aman,tentram dan tertib serta jauh dari risiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah						
	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
5.1	Indeks Rasa Aman		Indeks	75,00	n/a	n/a
5.1.1 Terjaganya Kehidupan Masyarakat yang aman dan tentram damai dan Harmonis						
	5.1.1.1	Angka kriminalitas	%	17,50	n/a	n/a
	5.1.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,50	n/a	n/a
5.2	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten		Indeks	173,50	171,17	99%
5.2.1 Meningkatnya Kapasitas penanggulangan Bencana Daerah dan Kemajuan Pembangunan Desa						
	5.2.1.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Indeks	Level 2	0,34	n/a
	5.2.1.2	Indeks Desa Membangun Desa	Indeks	0,6178	0,7288	118%

- c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
Berikut tabel capaian kinerja di bandingkan dengan target perjanjian kinerja :

Tabel 2.3.2

Pengukuran Kinerja dibanding dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PERBANDINGAN CAPAIAN (%)			Ket
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Angka Kemiskinan	12,58	12,31	11,55	
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,03	1,52	1,79	
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,54	0,32	0,43	
4	Indeks Gini Rasio	0,285	0,281	0,281	
5	Angka Pertumbuhan Ekonomi	28,4	20,34	20,34	
6	Pendapatan Perkapita	n/a	n/a	570,12	
7	Inflasi	n/a	4,98	1,23	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,2	2,84	2,84	
9	Persentase Kenaikan PAD	3,54	5,09	27%	
10	Nilai Investasi	96,602	91,786	81,58	
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,39	73,82	74,36	
12	Indeks Kesehatan	0,757	0,76	0,40	

13	Stunting (SSGI)	5,7	6,7	4,20	
14	Indeks Pendidikan	31,91	31,98	83,72	
15	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC (55,45)	CC (55,56)	0,00	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	n/a	n/a	n/a	
17	Nilai SAKIP	CC	CC	B	
18	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,56	71,86	70,80	
19	Indeks Inovasi Daerah	55,84	46,34	45,89	
20	Nilai SPBE	1,97	2,88	3,25	
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	60,97	81,05	n/a	
22	Indeks Profesionalitas ASN	48,21	68,82	66,46	
23	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	n/a	n/a	n/a	
24	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	24,3	31,79	37,49	
25	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	n/a	n/a	n/a	
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,01	80,01	78,17	
27	Indeks Rasa Aman	n/a	n/a	n/a	
28	Angka kriminalitas	19,42	9,21	n/a	
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,14	85,19	n/a	
30	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten	n/a	n/a	171,17	
31	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	n/a	n/a	34	
32	Indeks Desa Membangun Desa	0,6528	0,7127	0,7288	

d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;

Tabel 2.3.3
Perbandingan Dengan Target RPD

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kemiskinan	%	11,58	11,55	99,74%	
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,90	1,79	105,79%	
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,53	0,43	117,31%	
4	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,270	0,281	104,07%	
5	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	30,00	20,34	67,80%	
6	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	420	570,12	135,74%	
7	Inflasi	%	2,00	1,23	61,50%	

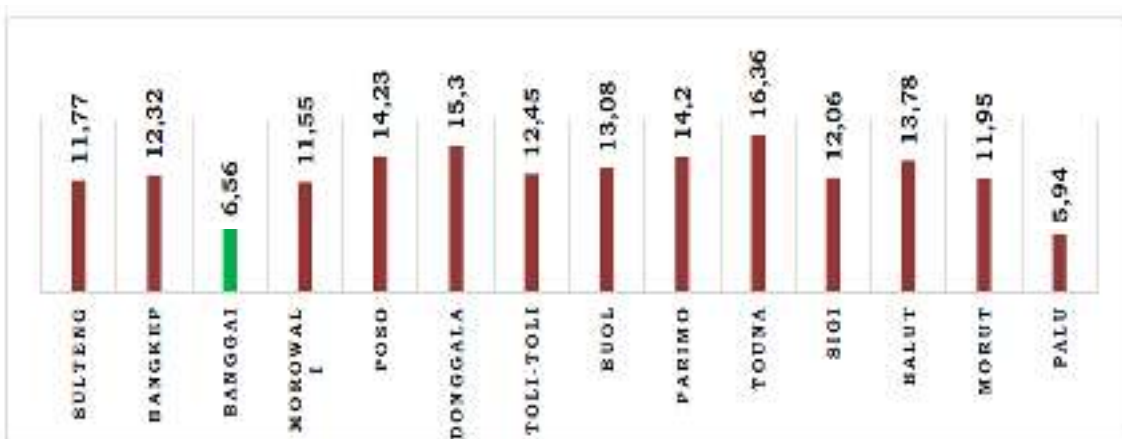
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2	2,84	142,00%	
9	Persentase Kenaikan PAD	%	4	27%	6,70%	
10	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	75	81,6	108,78%	
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73	74,36	101,86%	
12	Indeks Kesehatan	Indeks	0,46	0,40	86,96%	
13	Stunting (SSGI)	%	13,00	4,20	167,69%	
14	Indeks Pendidikan	Indeks	59	83,72	141,90%	
15	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	B	n/a	n/a	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	%	85,00	n/a	n/a	
17	Nilai SAKIP	%	BB	B	n/a	
18	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,40	70,80	91,47%	
19	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	42,50	45,89	107,98%	
20	Nilai SPBE	Nilai	2,00	3,25	162,50%	
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	77,00	n/a	n/a	
22	Indeks Profesionalitas ASN	%	76	66,46	87,45%	
23	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	70,00	n/a	n/a	
24	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	%	26,50	37,49	141,47%	
25	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	%	60,00	n/a	n/a	
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,50	78,17	95,91%	
27	Indeks Rasa Aman	Indeks	80,00	n/a	n/a	
28	Angka kriminalitas	%	16,00	n/a	n/a	
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,00	n/a	n/a	
30	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten	Indeks	173,50	171,17	98,66%	
31	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Indeks	Level 2	0,34	n/a	
32	Indeks Desa Membangun Desa	Indeks	0,6908	0,7288	106%	



- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan

Angka Kemiskinan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 436.471.473.785,00 dengan rincian aspek Mengurangi Beban Pengeluaran sebesar Rp. 184.484.512.241,00, aspek meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 126.184.376.802,00 dan aspek meminimalkan kantong kemiskinan sebesar Rp. 125.802.584.742,00. Pada tahun 2024 menurut data BPS Provinsi Sulawesi Tengah persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali berada di peringkat ke-3 (tiga) terendah se-Sulawesi Tengah Setelah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

Adapun upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2024 untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain Optimalisasi Anggaran Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp. 27.794.707.673,00 dan meningkatkan Koordinasi Dengan berbagai pihak terkait Validasi Data Kemiskinan khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem untuk menuju Zero Miskin Ekstrem Tahun 2024.

Angka Pertumbuhan ekonomi

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2024 berada pada angka 20,34 persen, angka pertumbuhan ini menempatkan Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Morowali Utara, target

RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 25,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 20,34 persen atau mencapai 81,36 persen realisasi. pertumbuhan Kabupaten Morowali kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir sejak tahun 2019 s/d tahun 2024.



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali berhasil mencapai nilai indeks Refromasi Birokrasi 68,25, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam hal reformasi birokrasi. Yang terdiri dari Nilai Indeks RB General 60,35 dan RB tematik 7,9. Nilai ini mengindikasikan bahwa upaya untuk memperbaiki sistem birokrasi telah mencapai kemajuan, Namun masih perlu perbaikan lebih lanjut. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusianya maupun sistem yang di bentuk sehingga indikator-indikator yang disusun dapat berorientasi hasil.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 50 Persen. Kulaitas Layanan Infrastruktur (KLI) adalah data dan informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu jalan dan

jembatan, irigasi, taman kota/RTH, drainase, PJU, AMPL, rambu dan penunjuk jalan, persampahan, sanitasi, dan halte. Sampai dengan tahun 2024 semester I Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, namun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Infastruktur dengan mengalokasikan anggaran spending mandatory untuk infrastruktur sebesar Rp. 1.053.755.455.191,13 atau 37,68 persen dari total APBD tahun 2024. Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 50 Persen. Kulaitas Layanan Infrastruktur (KLI) adalah data dan informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu jalan dan jembatan, irigasi, taman kota/RTH, drainase, PJU, AMPL, rambu dan penunjuk jalan, persampahan, sanitasi, dan halte. Sampai dengan tahun 2024 semester I Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, namun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Infastruktur dengan mengalokasikan anggaran spending mandatory untuk infrastruktur sebesar Rp. 1.053.755.455.191,13 atau 37,68 persen dari total APBD tahun 2024.

- f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

TUJUAN STRATGEIS I : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata

Angka Kemiskinan



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

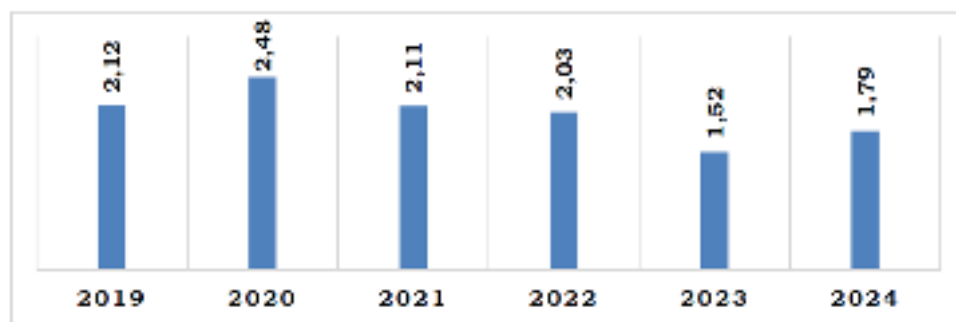
Pada tahun 2024 berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain : bantuan biaya pendidikan mahasiswa sebanyak 3.284 Orang, Insentif petugas keagamaan, bantuan jaminan kesehatan sebanyak 41.533 Orang bantuan jaminan persalinan sebanyak 3.782 Orang, bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 444 Unit, bantuan jaminan hidup santri sebanyak 945 Orang, bantuan permakanaan bagi fakir miskin dan penyandang isabilitas sebanyak 1.678 Orang, bantuan benih/bibit ternak, bantuan pupuk dan sarana maupun prasarana pertanian, insentif petugas persampahan 413 Orang, bantuan bagi pelaku UMKM, Bantuan BPJS Nelayan Sebanyak 9.200 Orang, bantuan Sarana Perikanan Tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan sebanyak 300 Unit, bantuan BPJS bagi Petani, bantuan bajak sawah dan bantuan panen gratis.

Indikator kemsikinan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran strategis yaitu :

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, target Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 1,90 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 1,79 persen atau mencapai 106,15 persen realisasi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemsikinan adalah Tingkat partisipasi angkatan kerja, Angka melek huruf, Tingkat pengangguran terbuka, Rasio ketergantungan penduduk, Rata-rata lama sekolah, Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). Pemerintah daerah Kabupaten Morowali telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali kurun waktu 6 (Enam) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2024) :

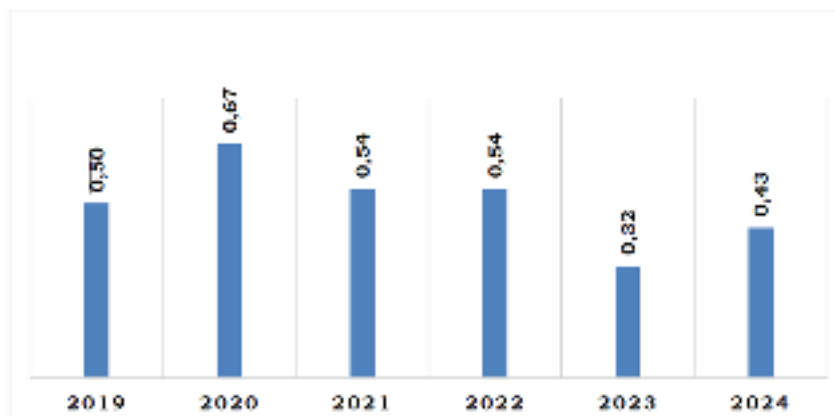


Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, target Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,52 persen, sementara Kinerja Indikator ini pada Tahun 2024 mencapai 0,43 persen atau mencaipaia 120,93 persen realisasi. walaupun demikian Indeks Keparahan Kemsikinan Kabupaten Morowali Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 0,32 persen. Adapun faktor-faktor pendukung Indeks Keparahan Kemiskinan antara lain Pengeluaran per kapita dan Garis kemiskinan. pemerintah daerah tetap melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan indeks keparahan kemiskinan, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi keparahan kemiskinan

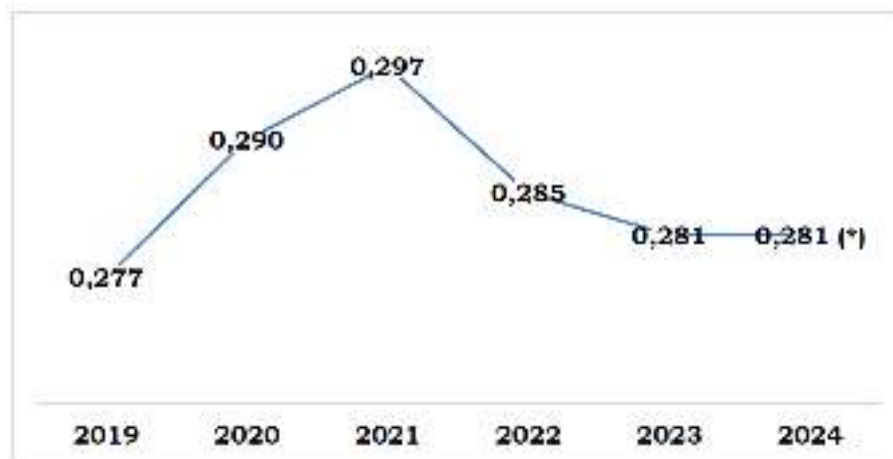
Kabupaten Morowali kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2024) :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

Gini Ratio

Gini Ratio, merupakan menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi disuatu wilayah. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali. target Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,280 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 0,281 persen atau mencapai 99,64 persen realisasi. Dengan demikian pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan angka indeks gini kabupaten Morowali pada tahun 2024, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Gini Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2024) :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

TUJUAN STRATEGIS II : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Saing Daerah

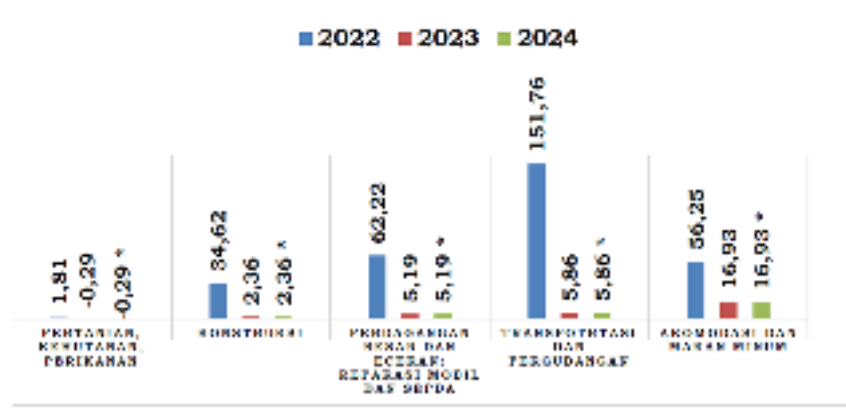
Angka Pertumbuhan Ekonomi

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2024 berada pada angka 20,34 persen, angka pertumbuhan ini menempatkan Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Morowali Utara, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 25,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 20,34 persen atau mencapai 81,36 persen realisasi.

pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan maupun industri pengolahan yang mencapai 25,29 persen, sementara untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan sektor penggerak ekonomi

masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan mencapai angka (0,29) persen.

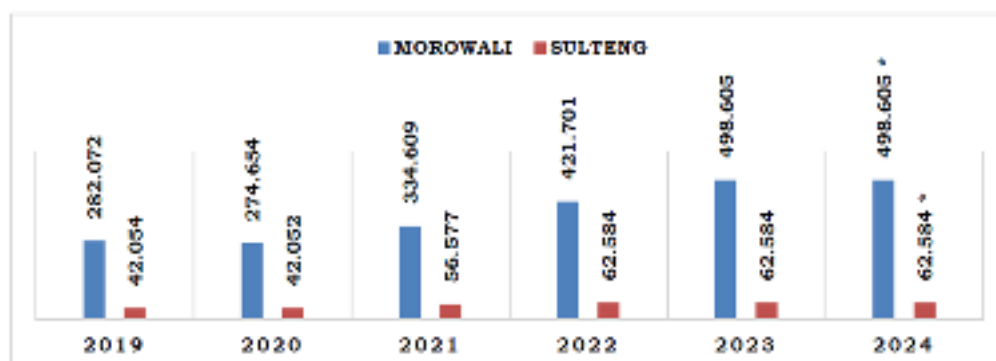
Sementara itu untuk melihat sektor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan perbandingan dengan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

✚ Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkaapita Kabupaten Morowali pada Tahun 2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berada pada angka Rp. 498 Juta Rupiah, angka ini menempatkan Kabupaten Morowali berada pada urutan Pertama Se-Sulawesi Tengah dengan Pendapatan Perkapita tertinggi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 498 Juta, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 498 Juta Rupiah atau mencapai 100,00 persen realisasi. Namun demikian pemerintah daerah masih tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita di Kabupaten Morowali hal ini disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Morowali yang mengartikan bahwa pendapatan perkapita yang tinggi namun belum merata sampai ke lapisan masyarakat paling bawah atau masyarakat miksin. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi pertumbuhan Perkaapita Kabupaten Morowali kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2024).



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, pada tahun 2024 ini untuk pertama kalinya Kabupaten Morowali masuk dalam Perhitungan Inflasi Oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 3,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Desember Tahun 2024 mencapai 1,23 persen atau mencapai 243,90 persen realisasi.

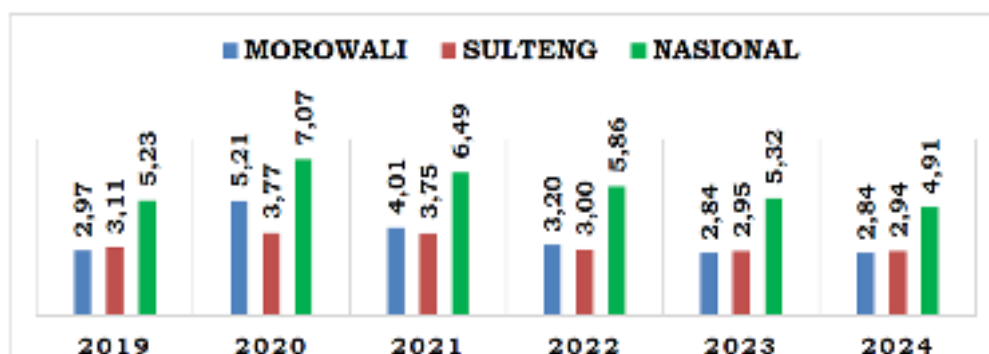
Adapun langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain dengan mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 1.651.148.200,00, anggaran ini digunakan untuk Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan menerapkan strategi 4 K yaitu Menjaga Keterjangkauan Harga, Menjaga Ketersediaan Pasokan, Menjaga Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif dengan mengikuti Rakor Inflasi yang diadakan oleh Kemendagri dan Rakor Forkopimda Pengendalian Kebutuhan Pokok.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, oleh sebab itu untuk mendapatkan angka TPT diukur dengan menggunakan persentase anatar jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada tahun 2024

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali berada pada angka 2,84 persen atau berada pada urutan ke-enam tertinggi Se-Sulawesi Tengah. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 3,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 2,50 persen atau mencapai 88,03 persen realisasi.

Walaupun kurun waktu lima tahun terakhir pemerintah daerah telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran secara persentase namun jika melihat data BPS tahun 2023 jumlah penganggur Kabupaten Morowali berjumlah 2.077 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 278 jiwa jika dibandingkan tahun 2022, hal ini terjadi karena angkatan kerja perempuan juga mengalami peningkatan, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka antara lain dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk usai kerja agar dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi sehingga dapat bersaing dipasar tenaga kerja, selain itu pada tahun 2024 ini pemerintah daerah juga melakukan telah melakukan kerja sama dengan kementerian perindustrian melalui pendidikan vokasi baik ditingkat D-1 maupun sampai dengan D-III. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2024 :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

Selain Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah adalah

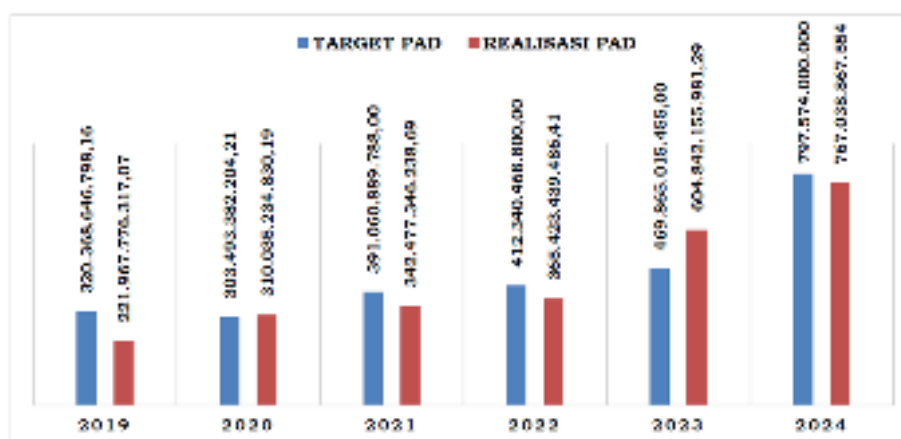
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami penurunan dan pada tahun 2024 TPAK Perempuan hanya berada pada angka 24,21 persen. Sehingga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi perempuan.

Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Kenaikan Pendapatan asli Daerah ini tentunya di sebabkan karena adanya perluasan wilayah usaha industri sehingga meningkatkan penerimaan pajak pada Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pada pajak penggunaan listrik.

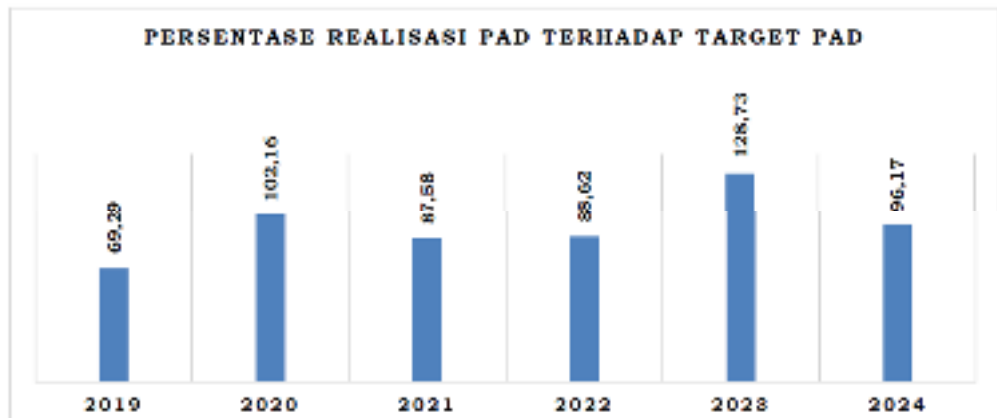
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 6,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 5,09 persen atau mencapai 84,83 persen realisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan yang signifikan dan realisasi PAD tertinggi adalah pada tahun 2024 hingga bulan oktober sudah mencapai Rp. 767.038.867.554,00 jika

dibandingkan dengan bulan desember tahun 2023 sebesar Rp. 604.842.155.981,29 atau mengalami peningkatan sebesar 26,82 persen. Sementara itu untuk target PAD pada Penetapan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 627.115.662.509,00 dan mengalami peningkatan pada perubahan APBD sebesar 27,18 persen atau senilai Rp. 797.574.000.000,00 grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi PAD Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (LRA Audited Kab. Morowali)

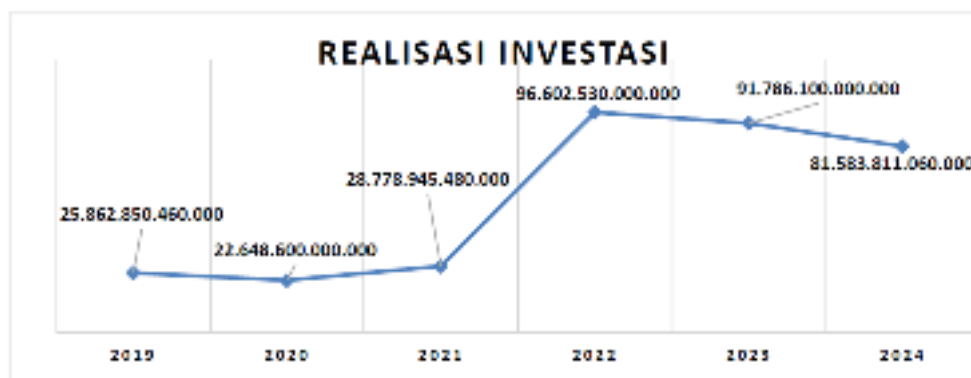
Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari ke 4 (empat) rincian obyek PAD Kabupaten Morowali, Pajak Daerah memberikan kontribusi paling tinggi sebesar Rp. 492.937.477.158,02 atau 64,26 persen dari Total Realisasi PAD, sementara untuk Retribusi daerah sebesar Rp. 207.872.178.088,00 atau 27,10 persen adapun persentase capaian Realisasi PAD Kabupaten Morowali terhadap Target PAD tahun 2019 s/d 2024 adalah sebagai berikut :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (LRA Audited Kab. Morowali)

Nilai Investasi

Kinerja pemerintah daerah menumbuhkan investasi di kabupaten Morowali patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa, hal ini dapat dilihat dari realisasi investasi Kabupaten Morowali yang mengalami kenaikan disetiap tahun. Target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 90 Triliun, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 mencapai 81.583 Trilliun atau mencapai 90,65 persen realisasi. Walaupun pada tahun 2023 realisasi Investasi mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 namun secara umum realisasi Investasi Kabupaten Morowali masih menempati urutan pertama se-Sulawesi Tengah. Grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi Investasi Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2024 :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2024 (data diolah)

Peningkatan investasi di Kabupaten Morowali juga salah satunya dapat diukur melalui peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan di kabupaten morowali masih kategori tidak sehat hal tersebut dikarenakan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang dikarenakan kurangnya sarana prasarana serta pendukung pelayanan kesehatan sesuai standard, selain itu gaya hidup sebagian besar masyarakat belum mengarah ke pola hidup sehat sehingga kurang mendukung peningkatan indeks kesehatan. Pola hidup tersebut antara lain kebiasaan merokok, Konsumsi sayur dan buah yang kurang, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan cek kesehatan secara rutin yang rendah. Sehingga pemerintah masih perlu memberikan sosialisasi atau edukasi mengajak masyarakat untuk mengarah ke pola hidup sehat.

Stunting (SSGI)

Penurunan Prevalensi Stunting di kabupaten Morowali dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. berdasarkan data PSG (Pemantauan Status gizi) Kemenkes pada tahun 2017, jumlah balita Stunting mencapai 3608 balita (34%), berdasarkan data RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) Kemenkes pada tahun 2018, Prevalensi balita stunting yaitu

30,40%. Sedangkan Pada tahun 2019 menurut data e-PPGBM balita stunting yaitu 1042 (12%), pada tahun 2020 data per agustus yaitu 849 balita (7.8%), Selanjutnya pada tahun 2023 Kabupaten Morowali mengalami penurunan yaitu pada bulan Desember 2023 menjadi 6,7% (648 Balita) dan pada tahun 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 4,2% (571 Balita), hal tersebut di tunjang dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah baik dari segi penyediaan sarana pelayanan, SDM Kesehatan yang terstandar juga Logistik untuk mendukung jalannya kegiatan penurunan stunting Pelaksanaan Intervensi Spesifik Maupun Sensitif juga dilaksanakan secara konfergensi oleh Lintas Program dan Lintas Sektor.

Hal ini juga di dukung oleh beberapa faktor adalah pendidikan dan pengetahuan orang tua sudah meningkat terutama masalah kesehatan dan gizi yang diperoleh melalui informasi-informasi baik melalui penyuluhan langsung maupun dari media-media yang ada, selain itu upaya penurunan status gizi kurang telah dilakukan yaitu dengan dukungan program upaya perbaikan gizi masyarakat (UPGK) dengan kegiatan penimbangan balita setiap bulannya di posyandu yang disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemberian makanan tambahan baik PMT penyuluhan maupun PMT pemulihan dan perawatan bagi penderita gizi kurang/buruk yang memerlukan perawatan.

Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian suatu daerah dalam bidang pendidikan. Indeks ini menggambarkan tingkat pendidikan penduduk berdasarkan dua indikator utama, yakni : Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rat Lama Sekolah (RLS). Dibawah ini Tabel data HLS dan RLS Kabupaten Morowali berdasarkan data BPS Sulawesi Tengah :

Tabel
Data HLS dan RLS tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	
	2023	2024	2023	2024
Sulawesi Tengah	13,33	13,34	8,96	9,04
Banggai Kepulauan	13,09	13,11	8,62	8,7
Banggai	13,34	13,35	8,63	8,81
Morowali	13,38	13,39	9,37	9,38
Poso	13,74	13,75	9,53	9,54
Donggala	12,61	12,62	7,99	8
Tolitoli	13,04	13,17	8,77	8,91
Buol	13,17	13,18	9,09	9,2
Parigi Moutong	12,51	12,52	8,04	8,05
Tojo Una-una	12,37	12,43	8,51	8,56
Sigi	13,05	13,13	9,03	9,04
Banggai Laut	13,03	13,04	8,64	8,65
Morowali Utara	12,29	12,44	8,94	9,13
Kota Palu	16,51	16,52	11,74	11,75

Sumber data : BPS Sulteng

Sehingga berdasarkan tabel di atas sesuai dengan formulasi pada Peraturan Bupati Morowali tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Indeks Pendidikan Kabupaten Morowali yaitu 0,837. Jika di bandingkan dengan target 57,00 maka Indeks Pendidikan dengan skala (1-100) yaitu 83,72. Sehingga di tahun 2024 indeks pendidikan melebihi target.

Adapun analisis terhadap capaian program/kegiatan indikator indeks pendidikan melebihi target yaitu : Program wajib belajar dan akses pendidikan, yaitu implementasi wajib belajar 12 tahun berjalan efektif dengan peningkatan partisipasi sekolah di tingkat SMA/SMK dan program bantuan berhasil membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan yang dampaknya dapat meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah.

TUJUAN STRATEGIS III : Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dengan nilai 68,25. Penilaian indikator tersebut terdiri atas RB general (60,35) dan RB Tematik(7,9). Penjumlahan dari kedua komponen tersebutlah menjadi Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi meningkat tentunya di dukung dari beberapa Indikator pada perhitungan RB general. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Morowali tentunya juga harus memperhatikan indeks RB melalui RB tematik dengan lebih memperhatikan setiap indikatornya yang harus memenuhi kriteria *SMART* dan cukup, juga dalam menyusun rencana aksi pada RB tematik disusun secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB tematik.

Nilai Sakip

Di tahun 2024 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat dengan mendapatkan kategori B dengan Nilai Evaluasi 60,68. Kenaikan Hasil evaluasi tersebut di pengaruhi oleh beberapa hal, yaitu

1. Melakukan pembaruan terhadap perencanaan kinerja pada beberapa unit kerja utama,
2. Memperbaiki dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah arah agar semua indikator kinerja memiliki formulasi sebagai acuan dalam pengukuran kinerja;
3. Telah membuat pedoman internal dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi kinerja melalui Peraturan Bupati Morowali Nomor 40 tahun 2023;
4. Telah melakukan peningkatan kualitas laporan kinerja pmda dengan memberikan analisis efesiensi dan faktor keberhasilan serta kegagalan dalam mencapai kinerja;

5. Telah melakukan evaluasi internal terhadap sebagian Perangkat Daerah guna melihat kondisi implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

Capaian kinerja indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2024 mengalami trend penurunan, dimana tahun 2024 Nilai SPI pada angka 70,80 (rentan) sehingga perlu langkah strategis untuk memperbaiki nilai SPI diperlukan program penguatan pencegahan korupsi, peningkatan transparansi dan penguatan pengawasan internal.

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 memperoleh skor indeks 45,89 meningkat dari tahun 2023. dengan predikat Inovatif. Pada tahun 2024 pemerintah daerah telah melakukan penginputan inovasi pada aplikasi Innovative Government Award (IGA) sebanyak :


- a. 23 inovasi yang terdiri atas : 19 inovasi dengan nilai kematangan 111,
- b. Satu (1) inovasi dengan nilai kematangan 108,
- c. Satu (1) inovasi dengan nilai kematangan 103, dan
- d. Satu (1) inovasi dengan nilai kematangan 50.

Namun skor indeks inovasi daerah tiap tahunnya mengalami penurunan. Di tahun 2023 indeks inovasi daerah berada di skor 46,34. Sehingga pemerintah daerah harus lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pada indikator penyusunan nilai indeks Inovasi daerah meliputi :

- 1) Peningkatan inovasi tata kelola pemerintahan meliputi implementasi Sistem Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi dengan telah dilakukannya penyederhanaan

struktur organisasi dan pengiptimalisasi impemnetasi sistem kerja pasca penyederhanaan dalam mendukung inovasi.

- 2) Peningkatan inovasi pelayanan publik dengan mendukung penggunaan teknologi dalam pelayanan publik
- 3) Peningkatan monitoring dan evaluasi inovasi daerah dalam kurun waktu tertentu.

 **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tahun 2024** dengan indeks 3,25 dengan predikat baik, dari tahun sebelumnya tahun 2023 dengan indeks 2,88. Hal ini tentunya di dukung oleh :

- a. Penyusunan dan reviu Dokumen arsitektur dan perancangan SPBE Kabupaten Morowali tahun 2022-2027;
- b. Menyusun Dokumen Sistem Management Keamanan Informasi (SMKI)
- c. Menyusun dokumen rencana pemetaan dan management core jaringan fiber optik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Indeks Pengelolaan Keuangan (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam

melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas Asn Tahun 2024 dengan predikat rendah dengan nilai rata-rata 66,46 yang dapat diukur berdasarkan dari beberapa indikator, berikut data hitung Laporan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN :

INSTANSI	KONDISI DATA	JENIS PESAWAR	JUMLAH IPS	KUALITAS				RATA-RATA NILAI	TOTAL NILAI	KATEGORI
				KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KEPERAWA	DISKURSI			
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI	12/02/2025	PHS	2738	20.39	20.38	27.5	5	62.67	157988.2	Rendah
	12/02/2025	PPN	2096	22.58	21.75	20.93	5	70.24	76685	Rendah

Sumber data : BKPSDM

TUJUAN STRATEGIS IV : Meningkatnya Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 50 Persen. Kualitas Layanan Infrastruktur (KLI) adalah data dan informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu jalan dan jembatan, irigasi, taman kota/RTH, drainase, PJU, AMPL, rambu dan penunjuk jalan, persampahan, sanitasi, dan halte. Untuk lebih mengefesienkan pencapaian dalam indikator tujuan IV ini di tunjang oleh 3 indikator sasaran yakni :

Persentase Jalan dalam kondisi Baik

Indikator tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, upaya pemerintah dalam meningkatkan kondisi jalan pada tahun 2024 dengan mengalokasikan sebesar Rp. 85.351.279.600,00 yang terdiri dari Pembangunan Jalan Rp. 13,100,343,984, Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Rp. 1,050,000,000, Rekonstruksi Jalan sebesar Rp. 69,638,015,116, Pemeliharaan Berkala Jalan Rp. 1.100.000.000

dan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Rp. 462,920,500.

Tingkat Ketaatan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun tahun 2022, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 55,00 persen

Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, namun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memenuhi tingkat ketaatan

terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.349.517.000,- yang terdiri dari Penilaian Perwujudan (Monev) RTRW Kab. Morowali Rp. 250.419.000,00 Peninjauan Kembali (PK) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Morowali Rp. 300.018.000 dan Revisi RTRW Kab. Morowali Rp. 799.080.000,00. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan PERDA RTRW Kabupaten Morowali tahun 2019 yang sudah harus direvisi pada tahun 2024. Disamping melakukan Revisi RTRW Tahun 2019 Pemerintah Daerah juga pada tahun 2024 melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan aloaksi anggaran Rp. 1.750.457.000,00 yang terdiri dari Penyelesaian RDTR Wosu dan sekitarnya Rp. 650.842.000,- Penyusunan RDTR Bahonsuai dan Sekitarnya Rp. 999.641.000,- dan Penyelesaian RDTR Perkotaan Bahodopi dan RDTR Lantula Jaya Rp. 99.974.000.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan hidup dari tahun ke tahun mengalami penurunan, IKLH di tahun 2024 hal ini tentunya berkaitan dengan daerah kawasan industri pada Kecamatan Bahodopi. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup melalui pengalokasian pengadaan peralatan dan perlengkapan TPST Kecamatan Bahodopi, berupa pengadaan Arm Roll 12 unit, pengadaan Dum Truck 10 unit,

pengadaan motor roda tiga 26 unit, pengadaan kontener sampah 34 unit dan pembangunan TPS Kecamatan Bahodopi 1 paket.

TUJUAN STRATGEIS V : Menciptakan Tatahan Kehidupan Wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman dengan target 70 persen. Untuk capaian sampai dengan semester I tahun 2024 indikator ini belum dilakukan pengukuran. Adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda dan Forkopimcam dan seluruh instansi vertikal di daerah secara berkala, Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dan Mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial. Untuk lebih mengefisienkan pencapaian dalam indikator tujuan V ini ditunjang oleh 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI), dengan ketentuan Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data IPG Kabupaten Morowali pada tahun 2023 yang berada pada angka 85,19 persen atau dikategorikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini

menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Ketahanan Daerah

Berdasarkan surat dari BNPB Nomor : B-06.26/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025, bahwa Indeks Ketahanan Daerah tahun 2024 Kabupaten Morowali yaitu 0,34. IKD

merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan, hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRB.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi, pada tahun 2023 IDM Kab. Morowali mencapai 0,6871. target P-RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 0,6178, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 juga berada pada 0,7288 atau 118 persen realisasi. Dari 126 Desa terdiri atas : 33 Desa dengan status Desa Mandiri, 33 Desa dengan Status Desa Maju dan 60 Desa dengan Status Desa Berkembang.



LAPORAN HASIL REVIU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

Nomor : *708/25/R-LAKIP/RHS/ITDAKAB/2025*
Tanggal, *24* Maret 2025

**INSPEKTORAT
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: Kompleks KTM. Morowali - BUNGKU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Morowali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bungku, 24 Maret 2025



INSPEKTUR,

AFRIDIN, SH. M.SA.
Pembina Utama Muda
NIP.19670308 199203 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuansingko
BUNGKU

Nomor : 700/25/R-LAKIP/RHS/ITDAKAB/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Atas Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

Bungku, 24 Maret 2025

Yth. Bupati Morowali

Di

Bungku

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Morowali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Pelaksanaan Reviu

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d) Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 00.1.2.3/02126/ST/ITDAKAB/UMUM/III/2025, tanggal 18 Maret 2025, tentang Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2025.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

4.1 Tujuan

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja instansi pemerintah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

4.2 Sasaran

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Bab II dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali telah melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Morowali Tahun 2024, terhadap Format LKjIP, mekanisme penyusunan, dan substansi dengan uraian simpulan sebagai berikut:

6.1.1. Format.

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja/LKj) Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

6.1.1.1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting IP; berupa; Gambaran Umum Wilayah, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Isu Strategis, Rencana Strategis tahun 2024-2026, Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keterkaitan antara Program, Anggaran dan Realisasi serta Capaian.

6.1.1.2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja; hal ini tertuang pada BAB. II, melalui tabel 2.3 Tujuan strategis beserta indikator dan Target Selama 2 (Dua) Tahun.

6.1.1.3. LKj pada prinsipnya telah menyajikan Capaian kinerja IP yang baik sampai dengan tahun 2024 atau tahun terakhir RPD Kabupaten Morowali 2024-2026, hal ini tergambar pada dokumen LKjIP BAB.II yang tertuang pada:

- Tabel 2.3.1, Capaian Kinerja Tujuan Strategis 1 “Terwujudnya peningkatan Masyarakat Melalui pembangunan Jaminan Sosial yang merata :
 1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP), capaian kinerja tahun 2024 yaitu B (85) capaian ini belum sesuai yang ditargetkan yaitu A (90).
 2. Indeks kepuasan masyarakat, capaian kinerja tahun 2024 dalam dokumen LKjIP ini belum dapat disajikan karena masih dalam tahap proses/belum rilis);
 3. Opini hasil pemeriksaan oleh BPK, capaian kinerja tahun 2024 dalam dokumen LKjIP ini belum dapat disajikan karena masih dalam tahap proses/belum rilis);
 4. Angka Kemiskinan (IAK) Kab. Morowali, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 102%:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Capai Kinerja tahun 2024 mencapai 105,79% kondisi ini belum melampaui apa yang ditarget tahun 2024 yaitu antara 1,700 -1,900,
2. Indeks Keparahan Kemiskinan Capai Kinerja tahun 2024 mencapai 118,86% kondisi ini belum melampaui apa yang ditarget tahun 2024 yaitu antara 0,43 -0,52,
3. Indeks Gini Rasio Capai Kinerja tahun 2024 mencapai 99,64% kondisi ini melampaui apa yang ditarget tahun 2024 yaitu antara 0,281 - 0,280,

- Tabel 21.3. Capaian Kinerja Tujuan strategis 2 “meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan sumber daya saing” terhadap capaian kinerja:

1. Angka Pertumbuhan ekonomi, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 81,36% kondisi ini melampaui dari apa yang ditargetkan ditahun 2024 yaitu antara 20,34.- 25,00
 - 1.1. Pendapatan Perkapita capaian kinerja tahun 2024 mencapai 114,48% dalam hal ini mencapai target akhir RPD ditahun 2024 yaitu antara 570,12–489 Juta Rp.
 - 1.2. insflasi capaian kinerja tahun 2024 mencapai 138,5% dalam hal ini mencapai target akhir RPD ditahun 2024 yaitu antara 1,230-2,00
 - 1.3. Tingkat Pengganggura Terbuka (TPT) capaian kinerja tahun 2024 mencapai 114,48%, capaian ini masuk dalam target yang telah ditargetkan ditahun 2024 yaitu antara 2,84 – 2,50, .
 - 1.4. Presentase Kenaikan PAD capaian kinerja tahun 2024 mencapai 447% melampaui dari yang ditargetkan ditahun 2024 antara 6 s/d 26,8.
 - 1.5. .Nilai Insvestasi,capaian kinerja tahun 2024 mencapai 90,65% capaian ini belum masuk dalam target yang ditetapkan ditahun 2024 antara 90-81,586.

2. Indeks Pembangunan Manusia (PM)), capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100% capaian ini sudah mencapai apa yang ditargetkan ditahun 2024 yaitu 74-74,38.

2.1. Indeks Kesehatan), capaian kinerja tahun 2024 mencapai 93,02 % capaian ini belum mencapai target dari apa yang telah ditargetkan ditahun 2024 antara 0,43-0,40.

2.2. Stunting (SSGI), capaian kinerja tahun 2024 mencapai 165% Capaian ini belum masuk dalam rangs rencana target tahun 2024 antara 17 – 4,2.

2.3. Indeks Pendidikan, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 147 % pencapaian ini melampaui target yang telah direncanakan ditahun 2024 antara 57-83,72

- Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Tujuan Strategis 3 “Meningkatnya pelaksanaan reformasi Birokrasi Pemerintah, Berlandaskan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa, Sehingga Tercipta Kerukunan Hidup Antar umat beragama”. terhadap capaian kinerja:

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100% pencapaian ini masuk dalam rengs rencana target tahun 2024 antara 8 – 68,25(B) sehingga mencapai target.

1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan Publik, capaian kinerja tahun 2024 mencapai n/a% pencapaian ini tidak masuk dalam rengs rencana target tahun 2024 antara 80,00 – n/a) Belum mencapai target:

1.2. Nilai Sakip, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100% pencapaian ini tidak masuk dalam rengs rencana target tahun 2024 antara B belum mencapai target;

- 1.3. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), capaian kinerja tahun 2024 mencapai 91% pencapaian ini tidak masuk dalam rengs rencana target tahun 2024 antara 77,40-70,80 belum mencapai target;
- 1.4. Indek Inovasi Daerah capaian kinerja tahun 2024 mencapai 115% pencapaian ini masuk dalam rengs rencana target tahun 2024 antara 40,00-45,89 Sudah mencapai target;
- 1.5. Nilai SPBE capaian kinerja tahun 2024 mencapai 113%, pencapaian ini masuk dalam rengs rencana target tahun 2024; antara 2,88-3,25 Sudah mencapai target;
- 1.6. Indeks Pengelolaan keuangan Daerah (IPKD) capaian kinerja tahun 2024 mencapai n/a pencapaian ini belum masuk dalam rengs rencana target tahun 2024 antara 68,96-n/a Belum mencapai target
- 1.7. Indeks Profesionalisme ASN capaian kinerja tahun 2024 mencapai 91% pencapaian ini belum masuk dalam rengs rencana target tahun 2024 antara 73-66,46 belum mencapai target

- Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Tujuan Strategis 4 “Meningkatnya Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan wilayah secara merata ”, terhadap capaian kinerja :

1. Indek Kepuasan layanan Infrastrukturu, capaian kinerja tahun 2024 mencapai n/a pencapaian ini melampaui target yang telah ditetapkan ditahun 2024 antara 24,50 – 37,49
 - 1.1. Presentase jalan dalam kondisi baik, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 153,02% dari target yang ditetapkan tahun 2024 antara 24,50 – 37,49 dengan demikian sudah mencapai target.
 - 1.2. Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang Wilayah (RTRW), capaian kinerja tahun 2024

mencapai n/a dari yang ditargetkan ditahun 2024 antara 55,00– n/a, dengan demikian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

1.3. Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capaian kinerja tahun 2024 mencapai 96,51% pencapaian ini belum masuk dalam rengs target yang telah ditetapkan ditahun 2024 yaitu antara 81,00-78,17.

- Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Tujuan Strategis 5 “Menciptakan tatanan kehidupan wilayah yang aman tentram dan tertib serta jauh dari risiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah ”, terhadap capaian kinerja :

1. Indeks rasa aman, capaian kinerja tahun 2024 mencapai n/a capaian ini belum memenuhi raget yang telah ditetapkan ditahun 2024 yaitu antara 75,00 – n/a.

1.1. Angka Kriminalitas, capaian kinerja tahun 2024 mencapai n/a capaian ini belum memenuhi raget yang telah ditetapkan ditahun 2024 yaitu antara 17,50 – n/a.

1.2. Indeks Pembangunan gender (IPG), capaian kinerja tahun 2024 belum mencapai n/a dari yang telah ditargetkan ditahun 2024 yaitu 86,50%.-n/a

2. Indeks Rawan Bencana. capaian kinerja tahun 2024 belum mencapai 99% dari belum mencapai targetkan ditahun 2024 yaitu 86,50%.-n/a.

2.1. Indeks Ketahanan Daerah, capaian kinerja tahun 2024 belum mencapai n/a dari yang telah ditargetkan ditahun 2024 yaitu Level 2

2.2. Indeks Desa membangun Desa, capaian kinerja tahun 2024 belum mencapai 118% Belum mencapai targetkan ditahun 2024 yaitu 0,6178-0,7288.

6.1.1.4. Tabel yang mendukung informasi pengukuran kinerja dengan tahun sebelumnya lampiran, namun telah disajikan dalam badan laporan.

6.1.1.5. Tabel Pebandingan dengan target RPD

6.1.1.6. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian Kinerja; Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah telah disajikan melalui BAB II, pada point a Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil identifikasi dan penelaahan Format dokumen LKj Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa LKj Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada prinsipnya telah disusun sesuai Format dan Sistematika berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

6.1.2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

6.1.2.1 LKj Instansi Pemerintah (IP) disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi sesuai kewenangannya yang dikoordini melalui Bagain Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.

6.1.2.2 Informasi yang disampaikan dalam LKjIP Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah didukung dengan data yang memadai yang bersumber dari 39 (tiga puluh Sembilan) Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;

6.1.2.5 Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.

6.1.2.6 Laporan Kinerja IP merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.

6.1.3 Substansi

Berdasarkan penelaahan dan analisa terhadap substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 diperoleh simpulan sebagai berikut :

6.1.3.1 Pada prinsipnya tujuan/sasaran dalam Lamporan Kinjerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;

6.1.3.2 Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis;

- 6.1.3.3 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja;
- 6.1.3.4 Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama;
- 6.1.3.5 Dalam Laporan kinerja telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu;
- 6.1.3.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah cukup mengukur tujuan/sasaran, namun beberapa OPD tidak melakukan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap Triwulan untuk memastikan apakah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terimplementasi tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai target.
- 6.1.3.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dalam LKjIP belum sepenuhnya spesifik dan Jelas, belum sepenuhnya dapat diukur secara objektif, belum sepenuhnya dapat dicapai, belum sepenuhnya terkait langsung dengan apa yang diukur (kondisi yang akan diukur), Indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, sehingga IKU dan IK dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2024 belum dapat dikatakan SMART (*Spesifik, Measurable, Attainable, Relevance dan Time Bound*).


6.2 Rekomendasi.

Berdasarkan simpulan atas penelaahan informasi terkait Format Laporan, Mekanisme penyusunan Laporan, dan Substansi Laporan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali agar mengoptimalkan Penerapan system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan melakukan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap Triwulan untuk dapat memastikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terimplementasi dengan baik.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang disajikan dalam LKjIP agar memenuhi kriteria spesifik dan Jelas (*Spesific*), dapat diukur secara objektif (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), Indikator kinerja harus terkait langsung (sedekat mungkin) dengan apa yang diukur (kondisi yang akan diukur), Indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (*Time bound*).

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan, atas perkenaanannya kami ucapkan terimakasih.


INSPEKTUR,
AFRIDIN, SH. M.SA.
Pembina Utama Muda
NIP.19670308 199203 1 010

Tembusan Yth,

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Gubernur Sulawesi Tengah.